



Pemkot Batasi Pelaku Usaha di Malioboro

Malioboro sebagai tujuan wisata tidak boleh terkesan semrawut dan padat.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan melarang adanya pedagang atau pelaku usaha baru di wilayah Malioboro. Bahkan Pemkot akan membatasi pelaku usaha yang boleh membuka usaha di wilayah ekonomis tertinggi di Yogyakarta tersebut.

Menurut Wakil Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, pihaknya akan membuat *zero growth* atau pertumbuhan nol untuk pelaku usaha di jantung kota Yogyakarta tersebut. Pasalnya menurut Haryadi, Malioboro sebagai pusat ekonomi dan pariwisata Yogyakarta tidak boleh terkesan semrawut dan padat.

"Beban Malioboro sudah cukup tinggi, pertumbuhan pelaku usaha harus kita tekan," paparnya di Yogyakarta, Jumat (22/5).

Terkait dengan penataan Malioboro ke depan, pihaknya akan membuat Unit Pelaksana Teknis

(UPT) khusus Malioboro. UPT inilah yang nantinya akan melakukan pengawasan ketat terhadap pertumbuhan dan perkembangan Malioboro baik dari segi keamanan, kebersihan, pelaku usaha maupun komunitas yang ada.

Melalui UPT ini, Pemkot kata Haryadi akan berusaha membuat Malioboro sebagai wilayah yang aman, nyaman, tidak semrawut dan tertata rapi sebagai kawasan bisnis dan pariwisata yang bersanding dengan baik.

UPT ini, lanjutnya, dalam pelaksanaannya akan menjembatani kepentingan enam instansi yakni, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Ketertiban, Dinas Kimpraswil dan Disperindagkoptan ini wajib bersinergi guna memunculkan solusi terbaik bagi ikon pariwisata Yogyakarta tersebut. "Para instansi ini harus mampu bekerjasama yang koordinatornya dibawah Disperindagkoptan," tegasnya.

Sosialisasi kepada 19 Paguyuban Kawasan Malioboro (PKM) juga terus dilakukan. PKM yang terdiri pedagang kaki lima (PKL),

asongan, seniman, juru parkir, tukang becak hingga pengusaha tersebut juga harus memiliki kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan keteraturan Malioboro.

Sejauh ini, penataan Malioboro, belum mengarah pembangunan fisik. Aspek teknis dan sosial yang menjadi prioritas revitalisasi tersebut. "Belum bicara fisik, soal anggarannya pun masih dikoordinasikan," katanya.

Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro (PKM), Agus Sujarwo Putra mengatakan sebetulnya pembatasan pelaku usaha di Malioboro sudah lama dimunculkan. Di kalangan pelaku usaha sendiri sudah mendukung upaya dari Pemkot Yogyakarta.

Sebab dengan pembatasan ini, kata Sujarwo, penataan terhadap pelaku usaha menjadi mudah. Ia mengkuatirkan jika setiap hari ada pendatang baru akan menyulitkan penataannya.

Bahkan awal Mei lalu, PKM telah melakukan *workshop* internal di Malioboro. "Hasilnya, kita merekomendasikan terjadinya *Zero Growth* di Kawasan Malioboro," kata Sujarwo. ■ yll

kan Kepada Yth .

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
3. Dinas Pemukiman dan Prasarana			
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per			
5. Dinas Ketertiban			
6. Badan Lingkungan Hidup			

